

RINGKASAN

KETENTUAN PIDANA MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

Oleh : Samsudi

Salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian berkenaan dengan masalah pidana dalam hukum pidana materil (KUHP), adalah timbulnya suatu disparitas pidana sebagai akibat tidak diaturnya ancaman pidana minimal khusus di dalam tiap-tiap deliknya. Dengan kata lain, hukum pidana khususnya sistem pemidanaan di Indonesia hanya mengenal pidana maksimal, dengan rentang yang amat jauh dengan pidana minimal di dalam ketentuan perundang-undangan pidana materil (KUHP). Keadaan tersebut berakibat pada upaya pencapaian kepastian hukum, karena pada kasus-kasus yang sama atau serupa walaupun *tempus delicti* dan *locus delicti*nya berbeda, akan diperlakukan tuntutan maupun pemidanaan yang secara signifikan akan berbeda. Tentunya keadaan ini dikhawatirkan memberikan peluang untuk terjadinya manipulasi hukum yang amat merugikan terhadap kepercayaan dan kewibawaan hukum, khususnya tindak pidana di bidang ekonomi sebagai bagian dari *economics crimes* yang terjadi dalam berbagai *modus operandi* akan menurunkan wibawa hukum dan pemerintahan, hal ini dikarenakan kelemahan materi hukum berupa ketidakmampuannya mengikuti perkembangan ekonomi. Berkenaan dengan hal seperti tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah tentang kecenderungan digunakannya ketentuan pidana minimal khusus yang terdapat di luar KUHP

khususnya tindak pidana di bidang ekonomi dan perumusan sanksi pidana minimal dalam sistem pidanaan di bidang ekonomi.

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah mengkaji secara teoritis dan praktis tentang kecenderungan digunakannya ketentuan pidana minimal khusus yang terdapat di luar KUHP dan perumusan ketentuan pidana minimal tersebut dalam sistem pidanaan di bidang ekonomi.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan ini digunakan guna melihat semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis dan konsep ketentuan pidana minimal khusus yang terdapat di luar KUHP dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, beserta kecenderungan digunakannya ketentuan pidana minimal khusus tersebut dalam sistem pidanaan di bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan untuk menggunakan ancaman pidana minimal khusus untuk tindak pidana di bidang ekonomi dapat dibenarkan berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali*, akan tetapi pembuatan perumusannya nampak tidak sistematis, tidak konsisten dan tidak harmonis; tentang kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan ketentuan pidana minimal khusus di bidang ekonomi yang berada di luar KUHP bisa diterapkan berdasar pada pertimbangan kebutuhan (*doelmatigheid*) sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional dengan tetap menitik beratkan bahwa hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan saran yang dikemukakan adalah ketentuan sanksi seharusnya dipisahkan antara yang menggunakan sanksi pidana dengan sanksi administratif; penyusunan pola pidanaan yang bersifat baku, agar supaya ada keseragaman formulasi kebijakan penal.

SUMMARY

A SPECIFIC MINIMUM CRIME SANCTION ON THE ECONOMIC CRIME ISSUES

By : SAMSUDI

One of the problems to concentrate upon substantive criminal law the Indonesian criminal law (KUHP) is the existence of the disparity of centency by the lack of a minimum punishment and sanction in every case and delict. A criminal law, especially, a crime system in Indonesia only apply a maximum crime sanction, which is so far from the substantive criminal law (KUHP). This condition influences punishment targets because in the same offences or similar to them will significantly by sentenced differently though they have the difference *tempus delicti* and its *locus delicti*. It will doubtly, of course, give opportunity to manipulate laws and legislation that break human belief and honor to the law and the government, especially to the Economics Crime Issues as a part of economic crimes which happens in some *modus operandi*, because the substantive criminal law weakness do not develop as well as economics progress. Based on the above case, the problem to anlyze is about the application trend of a minimum crime sanction out of the KUHP, especially to the economic issues and its sanction formulas the crime system in economy.

The goal of the research is to examine both theoretically and practically of the trend usage of the specific minimum crime sanction that exist out of KUHP and its formula for the economic crime system. The methodology used in this thesis are juridical approach and conceptual approach in order to observe a maximum possibilities of juridical aspects in KUHP and a concept of a specific minimum crime sanction out of KUHP, and its application trend in economic crime system. The research shows that the policy to use a specific minimum crime sanction is acceptable and applicable in the right of *lex specialis derogat legi generali*, but its creating formula does not seem systematic, consistence, and harmony. The consideration to create law and regulation by a specific minimum crime sanction in economic crime is needed because of *doelmatigheid* as suitable as national and international economic progress, but it is still focused on the criminal law as the last point (*ultimum remedium*). So far, the suggestion shown here, is that the crime sanctions between administrative sanction and punishment sanction must be separated, and an exact crime sanction must be held in order to get the same penal policy formulas.

ABSTRAC

A SPECIFIC MINIMUM CRIME SANCTION ON THE ECONOMIC CRIME ISSUES

By : Samsudi

A specific goal of the research is to examine theoretically and practically about the application trend to a specific minimum crime sanction out of the Indonesian criminal law (KUHP) and its formula in the economic crime system. The approach used in this thesis is juridical approach and conceptual approach in order to observe a maximum possibilities of juridical aspect sanction in KUHP and a concept of a specific minimum crime sanction out of KUHP, and its application trend in economic crime system. The conclusion of the research is that the policy to use a minimum crime sanction in economic issues is acceptable and right because of the existence of *lex specialis derogat legi generali*. However its formula does not seem systematic, consistence, and harmony. So far, the trend to use and apply them is needed by considering *doelmatigheid* as long as the national and international economic progress and still focus on the criminal law as the last point (*Ultimum remedium*).

Key word : a specific minimum crime sanction